

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang

Perkembangan ekonomi global memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan kemandirian dan daya saing sebuah negara di dunia internasional. Hal ini dimaksudkan agar suatu negara tidak tertinggal dengan kemajuan yang dialami negara lain. Meningkatnya daya saing Indonesia tercermin dari laporan World Economic Forum (WEF) yang merilis Global Competitiveness Index 2014 – 2015. Dalam laporan tersebut itu dikemukakan, daya saing Indonesia naik 4 tingkat menjadi peringkat 34 dari 144 negara di dunia.

Dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 disebutkan bahwa peningkatan produktivitas nasional dan daya saing di pasar internasional menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang sangat penting. Untuk melaksanakannya, beberapa strategi telah digariskan, antara lain dengan membangun konektivitas nasional, membangun perumahan dan kawasan permukiman, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan infrastruktur, penguatan investasi, meningkatkan kapasitas inovasi teknologi, dan sebagainya.

Dari dokumen tersebut jelas bahwa untuk mewujudkan agenda tersebut bukanlah hal yang mudah karena daya saing merupakan interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2014) menegaskan bahwa peningkatan daya saing harus dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, yaitu antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat kelembagaan dan tatakelola, serta membangun infrastruktur. Ketiga hal tersebut diramu untuk menghasilkan : (1) peningkatan produktivitas negara/ daerah pada skala ekonomi-nya; (2) inovasi; (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas; serta (4) penyempurnaan struktur sistem pembangunan nasional/ daerah.

Transparansi merupakan isu utama dalam pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik guna meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam rangka fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berakibat pada pemborosan. Salah satu wujud transparansi yang ditempuh pemerintah adalah pengungkapan informasi keuangan di internet sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada lingkungan pemerintah.

Pada era modernifikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan

manual dan konvensional (Bonson & Escobar, 2005 dalam Puspita dan Martani, 2012:2). Teknologi komunikasi dan informasi mengacu kepada penggunaan teknologi seperti: internet, intranet, ekstranet, *e-government*, ERP, dan bentuk teknologi lainnya yang menghadirkan kemajuan bagi entitas ekonomi.

Semakin banyaknya pengguna internet di tengah masyarakat menjadi cerminan bahwa internet telah menjadi kebutuhan penting. Dari data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2016 sudah mencapai 132,7 juta orang. Hasil survei yang dilakukan oleh BPS ditahun 2016, menunjukkan bahwa penggunaan internet dalam mencari informasi berita menjadi peringkat tiga, sedangkan akses penggunaan internet untuk layanan publik sebesar 91,6%.

Fenomena ini dimanfaatkan oleh sektor swasta dalam melaporkan kegiatannya pada *stakeholders* di perusahaan. Namun, dalam sektor publik atau pemerintahan termasuk juga pemerintah daerah masih kecil sekali pemanfaatan teknologi informasi khususnya internet (Hudoyo dan Mahmud, 2014). Meskipun sudah ada data yang mendukung tentang penggunaan internet oleh masyarakat, nampaknya pemerintah daerah belum memaksimalkan peran internet dalam pemerintahannya.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan

(Nordiawan, 2007:1). Perhatian terhadap isu transparansi di Indonesia semakin meningkat dalam satu dekade terakhir ini. Salah satu indikatornya ialah dikeluarkannya Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2004:30).

Peningkatan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik. Perhatian terhadap peningkatan transparansi di Indonesia berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Website pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et.al, 2005). Shim dan Eom (2008) menyatakan pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet efektif untuk meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Internet dapat dijadikan ruang penyedia informasi publik yang mudah diakses oleh pengguna informasi dan biaya yang ditimbulkan efisien bagi pemerintah (Styles dan Tennyson, 2007). *Website* dan teknologi berbasis web sering dianggap sebagai bagian penting dari setiap *e-government* (Yavus dan Welch, 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa internet dapat membantu mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang transparan secara efektif dan efisien.

Di Indonesia, penggunaan *website* sebagai implementasi *e-government* dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemandayagunaan Telematika di Indonesia yang kemudian diperjelas dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Hampir semua Pemda di Indonesia memiliki *website*, dengan kualitas *website* dan peranan yang berbeda. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah tersebut, namun ada juga yang telah

memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya.

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Keterbukaan Publik dalam rangka penyediaan informasi publik dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi pemerintah daerah dan mempublikasikan dua belas dokumen pengelolaan anggaran daerah. Instruksi tersebut diperkuat dengan keluarnya Instruksi Presiden No.7 tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan *E-Government* dan keterbukaan informasi kepada publik melalui upaya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pelaporan keuangan di internet (*website*) oleh pemerintah daerah. Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut belum memberikan hasil yang konsisten. Penelitian Style dan Tennyson (2007) menggunakan jumlah penduduk untuk mengukur ukuran pemerintah menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas data keuangan CAFR pada situs resmi pemerintah lokal AS. Pemerintah lokal dengan ukuran yang lebih besar cenderung

memberikan kemudahan dan kenyamanan akses data keuangan CAFR pada situs resminya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hilmi dan Martani (2012), Junaedi (2015), yang menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Arfansyah (2013), Sinaga dan Prabowo (2011) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

Besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pada daerah menunjukkan kinerja pemerintahnya yang baik (Laswad dkk, 2005). Rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sinaga dan Prabowo (2011); Medina (2012). Namun tidak sesuai dengan penelitian Puspita dan Martani (2012) yang menunjukkan hasil sebaliknya bahwa Rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh.

Berdasarkan ketidak konsistenan penelitian sebelumnya, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang dengan menambah atau mengurangi variabel dengan populasi, sampel, tempat, dan periode yang berbeda. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Medina (2012). Penelitian Medina (2012) dipilih karena penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang lebih kompleks dan beragam. Namun, penelitian ini menggunakan 2 (dua) dari 5 (lima) variabel independen yang dipakai dalam penelitian Medina (2012 dan menambahkan satu variabel Indeks Pembangunan Manusia.

Penambahan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan alasan IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara (BPS, 2016). Semakin tinggi pembangunan manusia, maka semakin beragam keinginan manusia yang ingin terpenuhi, yang akhirnya akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah terhadap hasil laporan keuangan yang baik (Liqoana, 2014).

Penelitian ini memilih di Sumatera bagian utara (Aceh, Sumatera Utara, Riau) sebagai populasi penelitian karena ketiga provinsi ini merupakan pintu gerbang hubungan kerja sama antara Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Sehingga pembangunan infrastruktur, akses teknologi informasi serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan daya saing daerah. Tata kelola yang baik menjadi hal yang krusial untuk menarik investor ke Sumatera, selain itu komitmen akan tata kelola yang baik, inklusivitas dan akuntabilitas untuk berkoordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah, harmonisasi, aturan serta transparansi, dan kejelasan regulasi juga penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Salah satu wujud peningkatan daya saing daerah adalah dengan peningkatan transparansi pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi dari pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan termasuk investor dalam mengakses kemajuan pembangunan daerah dan juga pertanggungjawaban atas dana-dana yang dikelola.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Pada Website Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Aceh Dan Riau Tahun 2014 – 2015**”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota?
2. Apa saja Informasi akuntansi yang diungkapkan pada website pemerintah kabupaten/kota?
3. Bagaimana ukuran pemerintahan daerah mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota?
4. Bagaimana rasio kemandirian daerah mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota?
5. Bagaimana indeks pembangunan manusia mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota?

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, belanja daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap Pengungkapan Informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran pemerintahan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota?
2. Apakah rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintahan daerah terhadap pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Indeks pembangunan Manusia dan Pengungkapan Informasi Akuntansi oleh Pemerintah.

2. Dalam bidang akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga literatur tambahan tentang sektor publik, khususnya praktek pengungkapan atas informasi keuangan dan transparansi pemerintah.

3. Bagi Objek penelitian/Pemerintah Daerah

Memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melaporkan keuangan di internet melalui *website*-nya.